

Seiring dengan perkembangan masyarakat mengenai jual beli, ada hak *khiyar* untuk konsumen. Sebelumnya yang dimaksud *khiyar* adalah pilihan, memilih melangsungkan atau membatalkan jual beli. Disini yang dimaksud *khiyar* untuk konsumen yaitu pilihan melangsungkan *retur* atau tidak melangsungkan *retur*. Dalam bertransaksi di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, baik yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Dan akad jual beli terdapat banyak sekali rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan sah, dan menghasilkan produk hukum yang halal. Karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa, keinginan tersebut harus ada pernyataan dari kedua orang tersebut seperti “saya telah menjual barang ini kepadamu” dan “saya terima barangmu”.

Perkembangan jual beli saat ini lebih sering transaksi jual beli di dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang dapat diakses secara “instan” melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer yang terhubung dengan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja atau melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut dengan era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta dapat

dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. Masyarakat islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli.

Salah satunya adalah jual beli *fashion hijab* di *Instagram* #tashaproject. Di #tashaproject menjual berbagai macam pakaian muslimah khususnya muslimah remaja. Dalam jual beli secara *online* ini, biasanya si penjual mengiklankan barang yang akan dijualnya melalui *Instagram* dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor *handphone* si penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli *online* yang curang. Dikarenakan si pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak penjual yang dirugikan atau dicurangi. Salah satu bentuk kecurangannya yaitu dengan berpura-pura *reseller*, agar bisa memperoleh barang dengan harga yang miring.

Ketika kedua belah pihak ada yang mempunyai keinginan yang tidak baik dalam bertransaksi jual beli, maka didalam hukum Islam mempunyai hak *khiyaʿ*, yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli, sehingga dengan adanya hak *khiyaʿ* ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Tetapi apakah benar dengan *khiyaʿ* ini hak si penjual dan pembeli bisa terpenuhi, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Alasan penulis mengambil kajian ini pada *instagram*, karena sosial media jual beli ini ramai dikunjungi oleh para penjual dan pembeli. Siapa saja boleh memasang iklan untuk menjual barang tanpa dimintai biaya, cukup dengan men-*download* aplikasi saja. Barang-barang yang diperjualbelikan cukup beraneka ragam, seperti baju, *handphone*, makanan, tas, dan lain sebagainya. Si penjual dan si pembeli biasanya hanya berhubungan melalui *whatsapp*, *line*, telepon dan melakukan transaksi pembayaran dengan *transfer* dan barang yang dibeli akan dikirimkan melalui *ekspedisi* oleh si penjual kepada si pembeli. Namun ternyata dalam perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan. Beberapa merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, atau barang yang diterima ternyata cacat, atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Dan pada umumnya barang yang diterima cacat atau rusak si pembeli komplain dengan meminta ganti barang yang baru karena barang yang sampai sudah ada cacat atau rusak.

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual. Karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam UU Perlindungan Konsumen.

Transaksi *retur* barang rusak atau cacat yang terjadi di #tashaproject adalah tidak adanya kepastian waktu barang *ready* atau dikirim kembali dari penjual untuk pembeli dikarenakan barang yang dijual oleh penjual adalah *Pre*

kemudahan dan hak *khiyar*. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum Positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kedua, perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Islam tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun dalam UUPK dibatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.⁸

Dari penelitian yang telah disebutkan, masih belum membahas tentang komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject. Dalam penelitian ini, penulis lebih condong menganalisis studi komparasi hukum Islam dan hukum positif hak *khiyar* konsumen dengan menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan Kitab Fath Al-Qarib dan juga sistem *retur* yang diterapkan di #tashaproject.

⁸ Solikhin, "Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang prinsip-prinsip muamalah, pengertian *khiyār*, macam-macam *khiyār*, hukum akad dalam masa *khiyār*, hukum *khiyār* dalam jual beli.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi lokasi penelitian meliputi: penjelasan tentang jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject, perlindungan konsumen terhadap pembeli/konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab keempat merupakan analisis masalah meliputi: Hak *khiyār retur* pembeli *fashion hijab* secara *online*, sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* di *instagram* #tashaproject, tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas pembeli *fashion hijab* secara *online*, Persamaan dan perbedaan hak *khiyār* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* secara online menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.